

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI *FINANCIAL DISTRESS* PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Aura Syarifah¹⁾, Nelly Masnila^{2*)}, Desi Indriasari³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

*2) *Corresponden author:* nellymasnila@polsri.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi, budgetary solvency ratio, kemandirian keuangan, dan tingkat efisiensi keuangan terhadap financial distress pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2015-2021. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel terpilih dalam penelitian ini sebanyak 8 provinsi di pulau Sumatera. Analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi logistik biner dengan bantuan SPSS version 26 for windows. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap financial distress, sedangkan budgetary solvency ratio dan tingkat efisiensi keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress pemerintah daerah..

Kata Kunci: *Derajat Desentralisasi, Budgetary Solvency Ratio, Kemandirian Keuangan, Tingkat Efisiensi, Financial Distress*

Abstract

This study aims to determine the effect of the degree of decentralization, budgetary solvency ratio, financial independence, and the level of financial efficiency on the financial distress of the provincial government on the island of Sumatra. This research is a quantitative study using secondary data, namely the Audit Report issued by the Indonesian Supreme Audit Agency in 2015-2021. Determination of the sample in this study using purposive sampling method. The number of samples selected in this study were 8 provinces on the island of Sumatra. Data analysis in this study used binary logistic regression with the help of SPSS version 26 for windows. The test results show that the degree of decentralization and financial independence has no effect on financial distress, while the budgetary solvency ratio and the level of financial efficiency have a significant negative effect on local government financial distress.

Keywords: *Degree of Decentralization, Budgetary Solvency Ratio, Financial Independence, Financial Efficiency, Financial Distress*

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2001, Indonesia telah menganut sistem otonomi daerah, dimana kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengaruh sistem pemerintahan daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut (Illahi, Haryati, dkk., 2021), Sejak pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah daerah bertugas mengatur

pekerjaan pemerintah daerah itu sendiri, baik berupa pembangunan daerah, maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu melayani masyarakat. Layanan ini meliputi penyediaan pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi umum, infrastruktur, dan barang publik.

Berdasarkan hasil riset Ombudsman (2021) menunjukkan fakta bahwa hanya 38,24% pemerintah provinsi di Indonesia yang memiliki rapor hijau dalam tingkat pelayanan publiknya. Hal itu membuktikan bahwa pemerintah provinsi di Indonesia masih banyak yang memiliki tingkat

pelayanan publik yang rendah atau buruk. Disaat pelayanan publik masih buruk, itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Belanja modal memiliki peranan yang penting dalam pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat, karena proporsi dana yang dialokasikan untuk belanja modal mempengaruhi pembangunan untuk memberikan penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang memadai.

Menurut Hasan & Nur (2016), semakin besarnya proporsi belanja modal terhadap belanja daerah secara keseluruhan merupakan salah satu ukuran kualitas belanja yang baik. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Salah satu standar mutu pelayanan yaitu belanja modal berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah sebesar 30%. Menurut (Dwitayanti dkk., 2020), minimnya jumlah belanja modal yang terealisasi karena belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja lainnya, dapat menjadi salah faktor yang menyebabkan pemerintah mengalami kondisi *financial distress*.

Menurut Jones & Walker (2007) dalam Waninda & Arza, (2019), *financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan dana (kesulitan keuangan) yang berakibat ketidakmampuan pemerintah untuk memberi pelayanan pada publik sesuai standar minimal mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Menurut Zakia & Setiawan (2021) ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai standar dikarenakan kurangnya infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah daerah akibat kurangnya alokasi belanja modal yang merupakan kondisi dari *financial distress*.

Dalam sektor pemerintahan, (Jones & Walker, 2007) dalam Syurmita (2014)

menggunakan dua indikator untuk memprediksi *financial distress* negara bagian di Australia, yaitu indikator keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan terdiri dari besaran dana yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur pelayan publik dan rasio-rasio kinerja keuangan. Sedangkan indikator non-keuangan terdiri dari karakteristik dewan dan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Illahi (2021) yang meneliti tentang prediksi *financial distress* pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan variabel independen kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, dan keselarasan belanja.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

(Jensen & Meckling, 1996) menjelaskan masalah keagenan yang disebabkan oleh pertentangan kepentingan antara agen selaku manajemen dan prinsipal selaku pemilik, baik itu permasalahan yang berupa *asymmetric information*, *adverse selection*, ataupun *moral hazard*. Menurut Moe (1984) menyatakan keterikatan prinsipal-agen dalam pemerintahan dapat ditelusuri dalam *budgeting process* yaitu antara: publik-pihak legislatif, pihak legislatif-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri- birokrat, serta pejabat pemberi pelayanan.

Hubungan keagenan dalam sektor publik terjadi antara pemerintah dengan publik, dimana publik memiliki posisi sebagai prinsipal yang memberikan mandatnya kepada pemerintah yang memiliki posisi agen dalam menyuarakan opininya. Menurut Hagen, dkk (2003) pendelegasian opini publik kepada legislatif dapat diilustrasikan dengan publik memberikan dana berupa pajak kepada pemerintah untuk membiayai segala kebutuhan publik, dimana dalam pengelolaan dana tersebut publik mempercayakan kepada lembaga legislatif dengan harapan bahwa dana yang mereka sudah

berikan tersebut dipergunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Bagian ini juga memuat Kerangka Pemikiran dan di bawahnya ditulis gambar mengenai kerangka pemikiran tersebut dan diberi nomor.

Financial Distress pada Pemerintahan

Menurut (Mahmudi, 2016), status *financial distress* dalam sektor pemerintahan diproyeksikan dengan rasio belanja modal terhadap total belanja sehingga dapat diketahui bahwa dalam menentukan status *financial distress* didapatkan dengan perbandingan antara realisasi belanja modal dan total belanja daerah yang bersangkutan. Menurut Syurmita (2014), bahwa pada pemerintah daerah, *financial distress* ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran yang dilakukan untuk belanja rutin, sehingga pemerintah daerah menekan pengeluaran untuk belanja modal atau belanja investasi. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab *financial distress* adalah misalokasi belanja modal yang disebabkan oleh tidak terkendalinya pengeluaran pemerintah.

Menurut (Jones & Walker, 2007), *financial distress* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Financial Distress} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belanja Modal

Dalam PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi Halim (2002). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Derajat Desentralisasi

Desentralisasi merupakan penyerahan tugas atau wewenang dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah. Desentralisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mempermudah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintah yakni, memaksimalkan potensi daerah masing-masing. Menurut Sartika (2016) desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana APBN dalam kaitannya dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Menurut Mahmudi, derajat desentralisasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Budgetary Solvency Ratio

Kemampuan total pendapatan kotamadya untuk mendanai semua pengeluaran dalam satu tahun fiskal dapat diukur dengan *budgetary solvency ratio*. *budgetary solvency ratio* adalah perbandingan total pendapatan masyarakat dengan total pengeluaran yang perlu dikeluarkan. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin banyak pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk belanja daerah. (Ritonga dkk., 2012) mengatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pendapatan yang ada dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin baik kemampuan pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya, termasuk belanja daerah yang nantinya akan mendatangkan manfaat jangka panjang yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga semakin tinggi nilai dari dimensi *budgetary solvency ratio* ini maka semakin rendah kemungkinan terjadinya *financial distress* pemerintah daerah.

Menurut (Ritonga dkk., 2012), *budgetary solvency ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Budgetary Solvency Ratio} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kemandirian Keuangan

Menurut (Rukmana, 2013) "kemandirian keuangan adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber

keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan-perundangan.”

Menurut (Mahmudi, 2016), kemandirian keuangan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Efisiensi Keuangan

Menurut (Handoko, 1995), efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Menurut (Halim, 2007), tingkat efisiensi keuangan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Keuangan} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Derajat Desentralisasi terhadap *Financial Distress*

Derajat Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi derajat desentralisasi maka kontribusi PAD semakin tinggi juga. Nilai PAD yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan total pendapatan daerah tersebut. Menurut Yanti (2018), total pendapatan daerah yang tinggi bisa berdampak pada kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga potensi untuk mengalami *financial distress* juga semakin kecil. Hal ini berarti pemerintah dengan derajat desentralisasi yang tinggi memiliki kewenangan

yang lebih banyak dalam mengalokasikan PAD nya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Diduga Derajat Desentralisasi berpengaruh negatif terhadap *Financial distress* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera

Hubungan *Budgetary Solvency Ratio* terhadap *Financial distress*

(Ritonga dkk., 2012) menyatakan bahwa *budgetary solvency ratio* digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pendapatan yang ada dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi nilai dari *budgetary solvency ratio* maka semakin baik kemampuan pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya, termasuk belanja daerah yang nantinya akan mendatangkan manfaat jangka panjang yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas.” Sehingga semakin tinggi nilai dari *budgetary solvency ratio* ini maka semakin rendah kemungkinan terjadinya *financial distress* pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Diduga *Budgetary Solvency Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera

Hubungan Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Distress*

Pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang rendah akan membutuhkan dana dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi pemerintah daerah provinsi, sumber dana tersebut diantaranya dapat berasal dari dana transfer pemerintah pusat (dana perimbangan). Sesuai pandangan teori ketergantungan sumber daya, pemerintah daerah yang memiliki kemandirian sumber daya keuangan akan memiliki kekuatan untuk bertahan hidup dan terhindar dari *financial distress*. Kemandirian keuangan juga telah digunakan oleh peneliti terdahulu sebagai indikator dalam menilai kinerja keuangan pemerintah (Syurmita, 2014). Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Diduga Kemandirian Keuangan berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress* Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera

Hubungan Efisiensi Keuangan terhadap *Financial distress*

Efisiensi berhubungan dengan kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode, dimana proses kegiatan operasional pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila menggunakan sumber daya atau dana dengan serendah-rendahnya yang diaplikasikan oleh pemerintah daerah dalam belanja daerah (Lazyra, 2016). Mahmudi, (2016) menjelaskan semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan bagus karena pemerintah daerah mampu menekan dana yang dikeluarkan dalam membiayai belanja langsung atau yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Rasio efisiensi yang kecil menjelaskan pemerintah daerah mampu menekan biaya operasional yang dibandingkan dengan realisasi pendapatan riil daerah sehingga dana tersebut dapat dialihkan kepada belanja modal pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pembangunan ataupun infrastruktur kepada masyarakat. Berdasarkan hal diatas dan penjelasan dalam kajian teori maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Diduga Efisiensi Keuangan berpengaruh positif terhadap *Financial Distress* Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 pemerintah provinsi di Pulau Sumatera yang menerbitkan laporan keuangan periode 2015-2021 sehingga jumlah sampel pada penelitian ini adalah 56 sampel.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumtaera periode 2015-2021. Data laporan keuangan diperoleh melalui publikasi data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status *financial distress* pemerintah

daerah yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik karena belanja modal yang dialokasikan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Status *financial distress* dalam penelitian ini diproyeksikan dengan rasio belanja modal terhadap total belanja. *Financial distress* pada penelitian ini menggunakan dummy (0/1) dengan kategori 0 = mengalami *financial distress* dan 1 = tidak mengalami *financial distress*. Menurut Jones & Walker (2007) status *financial distress* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Financial Distress} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Variabel Independen

Derajat Desentralisasi

Menurut Mahmudi (2016), derajat desentralisasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Budgetary Solvency Ratio

Menurut Ritonga dkk. (2012) *budgetary solvency ratio* digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pendapatan yang ada dengan total belanja yang harus dikeluarkan. *Budgetary solvency ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Budgetary Solvency Ratio} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kemandirian Keuangan

Menurut Mahmudi (2016), kemandirian keuangan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Transfer + Pinjaman}} \times 100\%$$

Efisiensi Keuangan

Menurut (Halim, 2007), tingkat efisiensi keuangan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Keuangan} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Teknik Analisis Data
Perumusan Model**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis logistik biner dengan menggunakan SPSS Versi 26 for windows. Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

$$\ln \frac{p}{p-1} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Ln P / (P-1) : Probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress* dan *non financial distress*

β_0 : Konstanta

β_1 - β_4 : Koefisien dari masing masing rasio

X_1 : Derajat Desentralisasi Fiskal

X_2 : *Budgetary Solvency Ratio*

X_3 : Kemandirian Keuangan

X_4 : Efisiensi Keuangan

e : eror

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan informasi mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Standar deviasi menunjukkan seberapa luas penyimpangan data dari nilai mean.

Menilai Keseluruhan Model

-2 log likelihood dapat digunakan untuk melihat kelayakan model yang digunakan dalam penelitian. Pengujian terkait dengan nilai ini dilakukan dengan membandingkan nilai -2 log likelihood sebelum ditambah variabel independen dengan nilai -2 log likelihood setelah ditambah variabel independen. Jika terjadi penurunan nilai dari -2 log likelihood sebelum ditambah variabel independen ke -2 log likelihood setelah ditambah variabel independen, maka model yang dipakai layak atau cocok.

**Tabel 1
Iteration History Block 0**

Iteration History^{a,b,c}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	77.561
	2	77.561

Sumber : Output Spss, 2023

**Tabel 2
Iteration History Block 1
Iteration History^{a,b,c,d}**

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients				
			Constant	Derajat Desentralisasi	BSR	Kemandirian Keuangan	Efisiensi
Step 1	1	67.621	89.565	-6.888	-34.133	.309	-55.031
	2	67.201	112.478	-8.791	-43.174	.386	-68.618
	3	67.188	117.369	-9.098	-45.146	.385	-71.491
	4	67.188	117.567	-9.109	-45.226	.385	-71.607
	5	67.188	117.567	-9.109	-45.226	.385	-71.608

Sumber : Output spss, 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan nilai, dapat dijelaskan bahwa nilai -2 log likelihood sebelum adanya variabel independen pada step 0 adalah sebesar 77.561 dan mengalami perubahan menjadi 67.188

setelah ditambah variabel independen. Hal tersebut menandakan bahwa model penelitian ini fit dengan data yang ada.

Koefisien Determinasi (Uji Nagelke's R Square)

Uji nilai nagelkerke R Square digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat variabel

independen dalam mempengaruhi variabel dependen dalam model yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 3
Koefisien Determinasi
Model Summary

	-2 Log Steplikelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	67.188 ^a	.169	.226

Sumber : Output Spss, 2023

Berdasarkan hasil pengujian Nagelkerke R Square yang tersaji dalam tabel diatas, nilai dari Nagelkerke R Square adalah 0,266 variasi yang terjadi pada variabel *financial distress* dijelaskan oleh variabel yang diteliti. Hasil ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan, derajat desentralisasi dan keselarasan belanja dianggap

mampu menjelaskan pengaruh terhadap *financial distress* dalam model yang digunakan sebesar 26,6% , sedangkan 73,4% lainnya dijelaskan oleh faktor di luar penelitian.

Menguji Kelayakan Model Regresi (Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test)

Tabel 4
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	5.334	7	.619

Sumber : Output Spss, 2023

Tabel hasil pengujian Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test yang dilakukan menunjukkan nilai Chi-square sebesar 5.334 dan signifikansi sebesar 0,619 dan nilai $0,619 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data empiris

dalam penelitian ini cocok, atau sesuai dengan model regresi dalam penelitian ini atau tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model penelitian dapat dikatakan fit dan penelitian dapat dilanjutkan.

Hasil Uji Hipotesis Uji Wald

Sutaryo S E dkk. (2010) menyatakan bahwa parameter atau koefisien regresi merupakan nilai yang menggambarkan besaran dan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Dalam penelitian ini kriteria pengujian yang digunakan adalah jika

nilai probabilitas variabel independen lebih kecil dari 5%, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sebaliknya jika nilai probabilitas variabel independen lebih besar dari 5% maka dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Tabel 4.5
Hasil Uji Wald

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a Derajat Desentralisasi	-9.109	7.680	1.407	1	.236	.000
BSR	-45.226	22.475	4.049	1	.044	.000
Kemandirian Keuangan	.385	2.579	.022	1	.881	1.469
Efisiensi	-71.608	34.861	4.219	1	.040	.000
Constant	117.567	56.519	4.327	1	.038	1.145E+51

Sumber : Output Spss, 2023

Mengacu pada output tabel diatas, diketahui bahwa variabel yang memiliki nilai Sig.< 0,05 adalah *Budgetary Solvency Ratio* yaitu sebesar 0,044 dan Efisiensi sebesar 0,040. Dengan demikian, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap prediksi *financial distress*, sedangkan variabel lain seperti derajat desentralisasi nilai signifikansinya > 0,05 yaitu sebesar 0,236 dan kemandirian keuangan sebesar 0,881 maka variabel derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi *financial distress*.

Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara parsial, derajat desentralisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress*. Hasil pengujian hipotesis pertama memiliki nilai signifikansi sebesar 0.236 dan koefisien sebesar -9.109. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 5% menunjukkan bahwa derajat desentralisasi tidak mampu dalam menentukan status *financial distress*, sehingga penelitian ini gagal mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pemerintah provinsi di pulau Sumatera periode 2015-2021. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Illahi, Haryati, dkk., 2021) yang memperoleh hasil bahwa derajat desentralisasi tidak mampu memprediksi status *financial distress*.

Pengaruh *Budgetary Solvency Ratio* terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara parsial, *budgetary solvency ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress*. Hasil pengujian hipotesis kedua memiliki nilai signifikansi sebesar 0.044 dan koefisien sebesar -45.226. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5% menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yaitu *budgetary solvency ratio* berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pemerintah provinsi di pulau Sumatera periode 2015-2021.

Variabel *budgetary solvency ratio* yang bertanda negatif (-) menunjukkan bahwa semakin besar *budgetary solvency ratio* maka semakin kecil kemungkinan terjadinya *financial distress* pemerintah provinsi di Pulau Sumatera periode 2015-2021. Hasil penelitian tersebut didukung oleh teori Ritonga dkk. (2012) yang mengatakan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio-rasio *budgetary solvency* maka semakin baik kemampuan pendapatan pemerintah untuk menutupi pengeluaran operasionalnya, sehingga pemerintah daerah tersebut dapat terhindar dari *financial distress*.

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara parsial, kemandirian keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress*. Hasil pengujian hipotesis ketiga

memiliki nilai signifikansi sebesar 0.881 dan koefisien sebesar 0.385. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 5% menunjukkan bahwa kemandirian keuangan tidak mampu dalam menentukan status *financial distress*, sehingga penelitian ini gagal mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pemerintah provinsi di pulau Sumatera periode 2015-2021. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Illahi, Haryati, dkk., 2021) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan tidak berpengaruh dalam memprediksi status *financial distress*.

Kemandirian keuangan pemerintah daerah yang tidak berpengaruh menjelaskan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah yang tinggi tidak selalu dapat meningkatkan alokasi yang diberikan dalam belanja modal dalam melayani masyarakat sehingga dapat menurunkan kondisi *financial distress* (Rusdi & Fuad, 2018). Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan tinggi dimana pemerintah daerah tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat atau provinsi, cenderung tidak akan mengalami *financial distress* atau memiliki ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran diluar kebutuhan rutin.

Pengaruh Tingkat Efisiensi Keuangan terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan tabel uji pengaruh variabel secara parsial, efisiensi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress*. Hasil pengujian hipotesis keempat memiliki nilai signifikansi sebesar 0.040 dan koefisien sebesar -71.608. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5% menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima, yaitu efisiensi keuangan berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pemerintah provinsi di pulau Sumatera periode 2015-2021.

Variabel efisiensi keuangan yang bertanda negatif (-) menunjukkan bahwa semakin besar tingkat efisiensi keuangan maka semakin kecil kemungkinan terjadinya *financial distress* pemerintah provinsi di Pulau Sumatera periode 2015-2021. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Atmaja (2012) yang menemukan bahwa rasio posisi keuangan dan rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

5. SIMPULAN

Simpulan

- 1) Hasil penelitian secara parsial Derajat Desentralisasi terhadap *Financial Distress* dengan tingkat signifikansi untuk variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,236 lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.
- 2) Hasil penelitian secara parsial *Budgetary Solvency Ratio* terhadap *Financial Distress* dengan tingkat signifikansi untuk variabel *Budgetary Solvency Ratio* sebesar 0,044 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05 dan koefisien sebesar -45.226 hal ini menunjukkan bahwa variabel *Budgetary Solvency Ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Financial Distress* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.
- 3) Hasil penelitian secara parsial Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Distress* dengan tingkat signifikansi untuk variabel Kemandirian Keuangan sebesar 0,881 lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.
- 4) Hasil penelitian secara parsial Tingkat Efisiensi Keuangan terhadap *Financial Distress* dengan tingkat signifikansi untuk variabel Tingkat Efisiensi Keuangan sebesar 0,040 lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05 dan koefisien sebesar -71.608 hal ini menunjukkan bahwa variabel Efisiensi Keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap *Financial Distress* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

Keterbatasan Penelitian

Berikut ini merupakan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini.

- 1) Berdasarkan hasil koefisien determinasi (Nagelkerke's R Square) relatif kecil, yaitu sebesar 0,226 atau 22,6%. Hal ini berarti variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 22,6% sedangkan

77,4% dijelaskan faktor lain di luar variabel yang diteliti.

- 2) Hasil penelitian belum dapat mewakili tujuan penelitian secara keseluruhan mengingat jumlah sampel yang digunakan hanya berjumlah 56 sampel.
- 3) Periode penelitian yang relatif pendek.

Saran

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara efisiensi keuangan dan *budgetary solvency ratio* terhadap prediksi status *financial distress*. Sehingga diharapkan pemerintah daerah lebih meningkatkan lagi efisiensi keuangannya dan jumlah pendapatan yang dapat menutupi kebutuhan daerah agar terhindar dari status *financial distress*.
- 2) Pemerintah daerah diharapkan dapat menyelenggarakan desentralisasi dengan menggunakan wewenangnya secara baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat terhindar dari *financial distress*.
- 3) Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti untuk seluruh Provinsi di Indonesia, agar dapat mengetahui secara luas pemerintah daerah yang dapat diprediksi mengalami *financial distress* dan dapat menguji variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh juga terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

- Atmaja, K. F. (2012). Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kemungkinan Financial Distress. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- Dwitayanti, Y., Armaini, R., & Aprianti, S. (2020). Analisis Pengaruh Budgetary Solvency Ratio Terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(2), 137–144.
- Fatás, A., Von Hagen, J., & Hallett, A. H. (2003). *Stability and growth in Europe: towards a better pact* (Vol. 13). Centre for Economic Policy Research.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi keuangan daerah: akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- <https://books.google.co.id/books?id=53xTNgAACAAJ>
- Halim, A. (2007). *MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH* (1 ed., Vol. 1). Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2007.
- Handoko, I. S. (1995). *Pengendalian Biaya Kualitas dalam Rangka Meminimumkan Non Value Added dan Meningkatkan Efisiensi pada PT. Radjin Steel Pipe Industry di Surabaya*.
- Hasan, M., & Nur, H. (2016). Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) dan The Ford Foundation. *Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) dan The Ford Foundation*.
- Illahi, F., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2021). PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN, DERAJAT DESENTRALISASI DAN KESELARASAN BELANJA DALAM MEMREDIKSI STATUS FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2015-2017. *Pareso Jurnal*, 3(3), 543–556.
- Illahi, F., Rice, ;, Dica, H. ;, & Silvera, Lady. (2021). The Effect Of Financial Independence, Degree Of Decentralization And Shopping Harmony In Predicting The Status Of Financial Distress Of Regency And City Governments In West Sumatra Province 2015-2017. *Pareso Jurnal*, 3(3), 543–556.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1996). 5 Theory of the Firm: Managerial. *Firms, Organizations and Contracts: A Reader in Industrial Organization*, 103.
- Jones, S., & Walker, R. G. (2007). Explanators of local government distress. *Abacus*, 43(3), 396–418.

- Lazyra, K. (2016). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kota medan. *Skripsi Program Studi Akuntansi*, 1–63.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Mahmudi, Ed.; 3 ed., Vol. 1). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Moe, T. M. (1984). The new economics of organization. *American journal of political science*, 739–777.
- Ombudsman. (2021). RAPOR KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK 2021. *RAPOR KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK 2021*.
- Republik Indonesia. (t.t.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*.
- Republik Indonesia. (2013). PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Dalam *PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar*. www.djpp.kemendikham.go.id
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012). Assessing financial condition of local government in Indonesia: an exploration. *Public and Municipal Finance*, 1(2), 37–50.
- Rukmana, W. V. (2013). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*, <http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/2013/08/jurnal-WAN-VIDIRUKMANA-090462201374-Akuntansi-2013.pdf>. (Diakses pada tanggal 8 Juli 2014).
- Rusdi, D., & Fuad, K. (2018). Metode Prediksi Financial Distress Di Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Untuk Mengukur Kesejahteraan Ummat. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 13–24.
- Sartika, N. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Merangin. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 4(3), 120–127.
- Sutaryo S E, Si, M., & Ak. (2010). NILAI RELEVAN INFORMASI LAPORAN KEUANGAN CASH MODIFIED BASIS: Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah di Indonesia. *LAPORAN KEUANGAN CASH MODIFIED BASIS: Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah di Indonesia*. <http://ssrn.com/abstract=2339632>
- Syurmita, S. (2014). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap prediksi financial distress. *Konferensi Regional Akuntansi (KRA) Dan Doktorat Kolokium 2014*.
- Waninda, W., & Arza, F. I. (2019). Relevansi Informasi Laporan Keuangan Accrual Basis: Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 1(2), 795–813.
- Yanti, R. D. (2018). Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Zakia, R., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 653–671.